

OK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR-RI
DENGAN
MENDAGRI RI, MENDIKBUD RI, MENPAR RI, MENKOP DAN UKM RI, MENPAN DAN RB RI,
MENKUM DAN HAM RI**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi X DPR-RI
Dengan	: Mendagri RI, Mendikbud RI, Menpar RI, Menkop dan UKM RI, Menpan Dan RB RI, Menkum dan Ham RI
Hari, tanggal	: Senin, 22 Oktober 2018
Pukul	: 19.31 WIB s.d 20.15 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: DR. Abdul Fikri Faqih.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri kh, s. Sos./Kabagset. Komisi X DPR-RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR-RI
Acara	: Pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif Pembentukan Panja RUU tentang Ekonomi Kreatif

KETUA RAPAT:

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

**Pak Menteri Perdagangan RI Saudara Enggar Tiasto Lukita,
Menteri Pendidikan Kebudayaan diwakilkan oleh Biro Hukum,
Menteri Pariwisata diwakilkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Industri dan kelembagaan,
Ibu Rizki Handayani Mustafa,**

Menteri Koperasi dan UKM diwakilkan Deputi Restrukturisasi Kemenkop dan UKM Saudara Ir. Abdul Kadir Damanik,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diwakilkan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diwakilkan oleh Direktur Harmonisasi Saudari Yunan Helmi,
Badan Ekonomi Kreatif diwakilkan Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Pak Ricky Pesik.

**Hadirin Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR-RI dan
Hadirin sekalian yang kami hormati.**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunianya kita diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR-RI dengan Menteri Perdagangan RI, Mendikbud RI, Menpan RI, Menkop dan UKM RI, Kementerian PAN dan RB, Menkumham dan Badan Ekonomi Kreatif pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati.

Melaporan dari sekretariat Komisi X saat ini daftar hadir Raker telah ditandatangani oleh 31 dari 55 anggota Komisi X DPR-RI yang telah lebih dari separuh unsure fraksi, tadi baru 5, sekarang sudah genap. Sehingga dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata tertib telah terpenuhi.

Sebelum melanjutkan rapat kerja ini, merujuk Surat Presiden RI nomor R-30/PRES/05/2016 tertanggal 16 Mei 2016 Perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Ekonomi Kreatif sebagai wakil pemerintah.

Kami ingin menanyakan terlebih dahulu kepada pemerintah dan yang hadir dari Menteri Perdagangan, Menteri Pendidikan, Menteri Pariwisata, Menteri Koperasi, Menteri PAN dan RB dan Menteri Hukum dan Ham. Sudah hadir semuanya, sudah ya, dari PAN dan RB sudah. Apabila sudah hadir semuanya, dengan mengucapkan bismillaahirrahmaanirrahiim, perkenankan kami membuka Raker hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)

Bapak-Ibu dan hadirin yang kami hormati.

Agenda Raker hari ini akan membahas beberapa hal yaitu:

1. Pembahasan DIM RUU tentang Ekonomi Kreatif,
2. Pembentukan Panja RUU tentang Ekonomi Kreatif,
Apakah dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Sebelum saya menyampaikan pengantar dan dalam rapat kerja pada hari ini kita perlu kesepakatan waktu sampai Pukul berapa ini, sekarang Jam 7.40, kita akan selesai Jam 21 Pak Menteri.

MENTERI PERDAGANGAN RI (ENGGARTIASTO LUKITA):

Siap Ketua.

KETUA RAPAT:

Pukul 21.00 WIB ya.

(RAPAT : SETUJU)

Kita usahakan Jam 21 selesai.

Sebelumnya, perkenankan kami menyampaikan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 telah dilaksanakan rapat kerja pertama untuk pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif. Pemerintah telah menyerahkan daftar Inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari 269 DIM dengan rincian sebagai berikut: DIM tetap 22, DIM diubah 34, DIM ditambahkan 29, DIM dihapus 184. Banyak sekali. Totalnya ada 269 DIM.

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati.

Terhadap DIM yang disampaikan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2018 tersebut, Komisi X DPR-RI telah melakukan telaah awal. Berdasarkan telaah kami, perkenankan kami menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. DIM diubah yang disampaikan oleh pemerintah bukan sekedar perubahan redaksi, namun merupakan DIM yang mengubah substansi dari draf sebelumnya. Hal yang menonjol dari DIM diubah ini adalah perubahan judul dari ekonomi kreatif menjadi pengembangan ekonomi kreatif.
2. DIM ditambahkan, yang disampaikan oleh pemerintah merupakan substansi baru yang ditambahkan secara umum meliputi:
 - a. adanya perubahan judul berdampak terhadap penambahan definisi dalam ketentuan umum mengenai pengembangan ekonomi kreatif.
 - b. adanya penambahan substansi terhadap tujuan pengaturan dalam RUU ini.
 - c. adanya penambahan substansi terhadap ruang lingkup pengaturan dalam RUU ini.
 - d. adanya penambahan substansi dalam bentuk bab baru yaitu peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.
 - e. adanya penambahan substansi mengenai infrastruktur ekonomi kreatif.
 - f. adanya penambahan substansi optimalisasi kekayaan intelektual dan skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual bagi pelaku kreatif.
 - g. adanya penambahan substansi dalam bentuk bab baru yaitu rencana induk pengembangan ekonomi kreatif.
3. DIM dihapus. Yang disampaikan oleh pemerintah lebih dari 65% dari DIM yang ada. Hal yang menonjol dari DIM dihapus ini antarlain, pemerintah menghapus 3 bab yaitu bab IV sumber daya manusia terpadu ekonomi kreatif, Bab VI kewirausahaan ekonomi kreatif, Bab X ketentuan peralihan.

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati.

Dari beberapa catatan yang kami sampaikan diatas, dari menja pimpinan menawarkan metode pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif ini yaitu dengan metode.

1. Dibahas per bab,
2. Dibahasa Pasal perpasal,
3. Dibahasa DIM per DIM atau,

4. Dibahas berdasarkan cluster masalah didalam DIM diubah DIM ditambahkan dan DIM dihapus.

Mohon tanggapan Pemerintah dan Anggota Komisi X DPR-RI.
Silakan mungkin barangkali ada masukan, bisa dari DPR dulu.
Silakan Pak Mujib silakan.

F-PG (Drs. A. H. MUJIB ROHMAT):

Terima kasih Pak ketua.

Pimpinan yang terhormat, Pak Menteri dan seluruh perwakilan pemerintah yang hadir, teman-teman sekalian Komisi X yang saya hormati.

Pertama saya merasa senang dengan ada penambahan kosa kata baru yaitu pengembangan ekonomi kreatif. Kalimat ini penting saya sebutkan karena ada pengalaman Pak menteri. Waktu itu ketika membahas tentang RUU Kebudayaan, karena nyaris sama dengan RUU Kreatif ini, kita akan berkuat dalam mendefinisikan tentang kebudayaan, ini Pak Mamannya ada. Kemudian kita akan Pak wakil kepala, kita akan terlibat lagi nanti soal pengertian ekonomi kreatif, karena itu saya kira kita masuk kepada bukan wilayah itu yang dikritisi oleh teman-teman dari isi dan sebagainya atau dikhawatirkan oleh mereka merasa baha oleh pemikiran kreatif kok dibatas-batasi dan sebagainya. Dengan penambahan kosa kata baru ini menjadi lebih jelas, bahwa kekhawatiran kekhawatiran tadi insay allah akan terhilangkan, karena yang kita maksud justeru memberikan ruang kepada mereka, memberikan perlindungan kepada mereka, memberikan hak kepada mereka untuk menikmati, juga mendapatkan hak-haknya sebagai orang yang creator. Itu yang pertama

Yang kedua, dari strategi ini mana yang kita pilih berkaitan dengan dimensi waktu, saya kira ada baiknya kita memilih dengan pendekatan yang nomor empat, dibahas berdasarkan berdasarkan cluster. Namun sebelumnya tentu ada kesepakatan dari pimpinan dan dari wakil pemerintah untuk membuat cluster terlebih dahulu, sehingga sebelum didalam forum terbuka, itu sudah ada nyaris ada kesepakatan, meskipun tidak harus sama Pak menteri dengan zaman dulu yaitu mufakat dulu baru musyawarah, ini tetap kita musyawarah. Jadi karena itu saya kira ada setengah kamar sedikit Pak menteri. Ada setengah kamar sedikit, sehingga akan memudahkan kita membahas ini dengan lebih tertib.

Kemudian yang lainnya, apa lagi ini akan ditambah dengan kesepakatan kemarin yaitu perlunya FGD. Yang ini barangkali nanti bisa menjadi tempat brainstorming untuk membahas segala sesuatu yang kita sebut sebagai ekosistemnya. Oleh karena itu berdasarkan tiga hal ini, saya mengusulkan pertama tadi, merespon dengan tambahan kosa kata, pengembangan, yang kedua adalah setuju dengan pendekatan yang nomor empat, dibahas berdasarkan cluster, tapi catatannya adalah dengan terlebih dahulu tim dari pemerintah dan tim dari komisi X itu mengcluster cukup baik. Kemudian yang ketiga adalah kapan kita melaksanakan diskusi FGD itu.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yang pertama belum waktunya Pak, yang kedua, nah ini yang bararti boleh memilih nomor 4, karena baru empat, memilihnya nomor 4 ini Pak Mujib. Anggot ada lagi, kalau sudah cukup. Anggota

ini memilih yang 1-4 atau perfraksi, kalau tadi Pak Mujib Golkar, barangkali diwakili oleh Pak Mujib, fraksi lain sebelahnya Pak Putu, Demokrat pakai pilih nomor berapa 1, 2, 3 dan 4, nomor 4 ya. Kemudian sebelahnya Ibu Titiek 1, 2, 3, 4 apa per bab, pasal per pasal, DIM per DIM atau ini sepertinya karena kemarin pakai metode yang terakhir ini dan ternyata bisa cepat memang. Ibu Titiek pakai memilih pembahasan, ini metode pembahasan. Terus kemudian yang belum Gerindra nomor 4 juga. sebelahnya Ibu Ratih PPP ini lebih lengkap ini Ikut Pak Putu apa ikut Pak Mujib, ikut Pak Putu nomor 4 juga sama. Ibu Zairina, Hanura. Saya kira hampir semuanya. PKS tidak ada. Saya nomor 4 juga Pak.

Kemudian dari pemerintah.

MENTERI PERDAGANGAN RI (ENGGARTIASTO LUKITA):

la Bapak Pimpinan karena tidak ada nomor 5, saya ikut nomor 4 itu.

KETUA RAPAT:

Jadi yang kita pakai ini memang mungkin baru saja kita membahas beberapa Undang-Undang, termasuk sekarang yang hampir selesai RUU tentang SSKCKR (serah simpan karya cetak karya rekam) dan memang metode pembahasannya berdasarkan cluster ini nanti. Yang bermasalah mungkin agak lama, tapi yang kita mudah-mudahan kita bisa cepat. Memang nomor 4 sehingga kita sepakat. Terima kasih. Dengan demikian metode pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif ditetapkan menggunakan metode nomor 4 yaitu dibahas berdasarkan cluster masalah didalam DIM dibuahkan DIM ditambahkan dan DIM dihapus.

(RAPAT : SETUJU)

Bapak-Ibu hadirin yang kamihormati

Saudara Menteri, perkenankan saya membacakan rincian DIM sebagai berikut.

Menerima rumusan DIM tetap sejumlah 22 DIM yaitu, DIM 1, DIM 3, DIM 8, DIM 9, DIM 11, DIM 20, DIM 23, DIM 28, DIM 29, DIM 31, DIM 32, DIM 34, DIM 36, DIM 38, DIM 45, DIM 195, DIM 208, DIM 210, DIM 211, DIM 214, DIM 216.

Ada tanggapan mungkin. Tetap ya. Pak menteri.

(RAPAT : SETUJU)

34 DIM diubah diserahkan ke Panja. Jadi ini bukan diterima atau tidak, tapi nanti diserahkan ke Panja untuk dibahas.

DIM 1, Dim 4, DIM 5, DIM 6, DIM 7, DIM 10, DIM 13, DIM 16, DIM 18, DIM 21, DIM 27, DIM 34, DIM 42, DIM 37, DIM 42, DIM 51-DIM 57, DIM 86, DIM 114, DIM 115. Kok dua kali, ini dihapus saja, jangan salah-salah ini, ini dokumen. DIM 114 ini satu kali saja ya. Langsung DIM 176, DIM 178, DIM 179, DIM 196, DIM 212, Dim 213, DIM 217, DIM 234, DIM 256, DIM 262. Ini DIM nya diubah, tapi bukan dibahas disini, kita serahkan kepada Panja.

Setuju Bapak-Ibu, setuju ya kita serahkan kepada Panja.

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian 29 DIM ditambahkan juga ini diserahkan ke Panja, hanya perhatian saja untuk nanti kita mendapatkan persetujuan. Kecualai kalau memang sepakat mau sepakati disini, berarti beda lagi. Tadi yang salah tadi 115. Setelah 115 terus 144, bukan 114 lagi. Ralat ini setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian yang ditambahkan 29 DIM. DIM 14, DIM 41, DIM 44, DIM 48, DIM 84, DIM 85, DIM 111, DIM 113, DIM 146, DIM 147, DIM 193, DIM 194, DIM 200-DIM 205, DIM 209, DIM 215, DIM 226, DIM 227, DIM 232, DIM 233, DIM 246, DIM 261, DIM 265, DIM 267, DIM 269. Ini juga ditambahkan 29 DIM diserahkan ke Panja.

Apa setuju Bapak-Ibu, setuju ya?

Pak Menteri?

(RAPAT : SETUJU)

184 DIM dihapus, tetapi diserahkan ke Panja untuk juga dicermati, yaitu DIM 15, DIM 17, Dim 19, Dim 22, DIM 24-DIM 26, DIM 30, DIM 33, DIM 35, DIM 40, DIM 43, DIM 46-DIM 50, DIM 54, DIM 59-82, DIM 87-110, DIM116-145, DIM 148-175, DIM 177, DIM 180-192, DIM 197-199, DIM 206, DIM 207, DIM 218-225, DIM 228-231, DIM 235-245, DIM 247-255, DIM 257-260, DIM 263, DIM 264, DIM 266, DIM 248. Ini dihapus, tapi tetap diserahkan kepada panja.

Apakah Bapak-Ibu setuju?

Pak Menteri setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Perlu kami ingatkan bahwa DIM tetap masih bisa dilakukan perubahan, rumusan apabila substansinya berkaitan dengan DIM-DIM lainnya yang telah dilakukan pembahasan. Jadi ini juga tidak mengunci kepada panja, supaya barangkali ada pencermatan-pencermatan kembali. Ini luar biasa memang dihapus banyak sekali, sehingga ia terima kasih juga kepada tim dari pemerintah, karena mencermati betul, tapi sedikit demi sedikit diluar forum kita sudah menyicil hal-hal yang agak berat nantinya. Jadi mohon kalau bisa pemerintah sudah sepakat, nanti jadi di panja itu tidak terlalu berat. Perlu kita ingat lagi dipembahasan-pembahasan sebelumnya yaitu tentang biasanya diawal ketentuan umum karena tadi kita sudah juga dikasih warning oleh pelaku ekonomi kreatif sebagaimana Undang-Undang Kebudayaan ia Pak Mujib, bahwa kreativitas kok dibatas-batasi dengan Undang-Undang. Maka ini luar biasa, tapi bukan disini Pak Mujib nanti disepakatinya di panja. Ini luar biasa sudah ada terinspirasi dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, sekarang ada pengembangan ekonomi kreatif, saya kira ini angin segar juga. Jadi tentang ketentuan umum, kemudian biasanya yang lalot tentang keuangan dan kelembagaan. Sekali lagi kalau bisa jangan dibebani diskusi yang terlalu berat, karena ini kembali lagi kepada pemerintah, kalau kelembagaan kepada pemerintah, termasuk keuangan karena ini lagi berat atau lagi ringan tergantung pemerintah. Oleh karenanya nanti kalau bisa ada formula yang memberikan keluasaan. Jadi nanti andaikan lagi longgar atau lagi sempit, Undang-Undang ini tidak dilanggar, termasuk kelembagaan. Jadi kelembagaan itu apa dibentuk atau tidak dibentuk, itu jadi tidak dilanggar, ini bagaimana caranya.

Mengingat rapat kerja akan membentuk panitia kerja, maka daftar nama anggota Panja DPR-RI dan Pemerintah diharapkan sudah dapat kami terima jumlah anggota Panja DPR-RI sebanyak 30 orang dan jumlah anggota Panja Pemerintah sebanyak 24. Jadi dari DPR 30 dan dari Pemerintah 24. Jadi nanti 54 orang. Daftar nama panjangnya nanti dialmpirkan, jadi sebagai gambaran saja. Kalau dari DPR-RI 5 orang pimpinan, semuanya adalah panja, kemudian anggota. Dari PDIP ada 5 orang, adari Partai Golkar ada 4 orang, dari Gerindra ada 3 orang, dari Demokrat ada 2 orang PAN ada 2 orang, PKB 2 orang, PKS 2 orang, PPP 2 orang, Nasdem 2 orang dan Hanura 1 orang. Jadi total semuanya ada 30. Nah kami dari pemerintah, kami nanti mohon susunan nama-namanya. Saya kira jumlah sudah cukup. Kemudian kita ketok saja ya, nanti kita serahkan. Jadi sepenuhnya nama-nama ini juga ada,

saya kalau bacakan saya kira 30 orang dan nanti dari pemerintah kami tetapkan saja, kami setuju, kami juga tidak tahu dari pemerintah siapa saja, kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Kita setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati

Setelah Panja RUU tentang Ekonomi Kreatif terbentuk, Rapat Kerja hari ini akan memberikan mandat kepada Panja RUU tentang Ekonomi Kreatif untuk melakukan pembahasan dengan metode yang telah kita sepakati yaitu per cluster.

Dengan telah terbentuknya Panja RUU tentang Ekonomi Kreatif, kami mengharapkan anggota tim panja baik itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Pariwisata RI, Kemendikbud RI, Kemenkop dan UKM RI, Kemenpan RB dan Kemenkumham RI berkomitmen untuk melakukan pembahasan dan menghadiri kegiatan yang akan dijadwalkan dalam rapat panja yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Ini semuanya sesuai dengan surprise Surat Presiden, tapi ada rapat sebelumnya Pak, yang mengamanatkan kepada melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian. Nah itu berarti Badan Ekonomi Kreatif. Jadi ini disini soalnya ini sesuai dengan surprise Pak. Jadi ini sesuai dengan surprise ini sesuai karena nanti semua harus konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan surat-surat yang ada, tetapi juga kita harus memenuhi tuntutan rapat-rapat sebelumnya. Jadi kami mohon nanti kepada pemerintah untuk juga mengajak. Jadi terutama dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, supaya kita mendapatkan, memang tidak menyalahi surprise berarti, tidak menghadirkan, tetapi karena ada permintaan dari rapat kerja sebelumnya, maka supaya memperlancar karena kalau tidak ada kementerian dalam negeri misalnya tadi diskusi tentang kewenangan dan seterusnya, maka kita akan menunggu nanti rapat-rapat selanjutnya.

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati.

Sebelum kami menutup acara Raker hari ini, maka izinkan pimpinan menyampaikan konsep keputusan. Atau mungkin sebelum kami menyampaikan, barangkali ada, langsung saja ya. Langsung saja silakan. Kita langsung saja ini kesimpulan.

Bapak Pimpinan dan anggota serta Pak Menteri dan Jajarannya.

Kesimpulan/Keputusan Raker hari ini Komisi X DPR-RI.

1. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyetujui jumlah DIM dan RUU tentang Ekonomi Kreatif sebanyak 269 DIM, dengan rincian DIM tetap 22, DIM diubah 34, DIM ditambahkan 29, DIM dihapus 184. Total 269 DIM. Saya kira ini tidak ada masalah ya.

Setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi X DPR-RI dan Pemerintah menyetujui DIM tetap dan selanjutnya memberikan mandat kepada Panja untuk membahas DIM diubah, DIM ditambahkan dan DIM dihapus. Dengan rincian nomor DIM sebagai berikut. 34 DIM diubah DIM 1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 18, 21,

27, 37, 42, 51-57, 86, 114, 115, 144, 176, 178, 179, 196, 212, 213, 217, 234, 256 dan DIM 262. Kemudian DIM yang ditambahkan. DIM 14, 41, 44, 48, 84, 85, 111, 113, 146, 147, 193, 194, 200-205, 209, 215, 226, 227, 232, 233, 246, 261, 265, 267 dan DIM 269. Itu DIM yang ditambahkan. DIM yang dihapus 184 DIM. Yaitu DIM 15, 17, 19, 22, 24-26, 30, 33, 35, 40, 43, 46-50, 59-82, DIM 87-110, 116-145, 148-175, 177, 180-192, 197-199, 206, 207, 218-225, 228-231, 235-245, 247-255, 257-260, 263, 264, 266 dan terakhir DIM 268.

Setuju Bapak-Ibu?
Pak Menteri setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Komisi X DPR-RI dan Pemerintah menyetujui pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif menggunakan metode berdasarkan cluster masalah dalam diubah dalam DIM ditambahkan, dalam DIM yang dihapus. Ini menggunakan metodenya setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian selanjutnya Komisi X DPR-RI dan Pemerintah menyetujui pembentukan Panja RUU tentang Ekonomi Kreatif yang terdiri dari Tim Panja DPR-RI berjumlah 30 orang dan Pemerintah berjumlah 24 orang dengan susunan panja terlampir.
Setuju ya?

Setuju Bapak-Ibu?
Pak Menteri ada tambahan?

MENTERI PERDAGANGAN RI (ENGGARTIASTO LUKITA):

Ketua mohon ijin, itu tentang pengembangan ekonomi kreatif sesuai tadi yang disampaikan.

KETUA RAPAT:

Yang mana?

MENTERI PERDAGANGAN RI (ENGGARTIASTO LUKITA):

Judulnya.

KETUA RAPAT:

Oh belum Pak. Kita sudah serahkan kepada panja Pak, nanti biar panja yang bekerja Pak. Kita serahkan kepada panja dari judul, meskipun ini sudah memberikan jalan, artinya tidak berlama-lama.
Setuju ya.

Jadi masih ekonomi kreatif, nanti kalau panja sudah bersepakat, nanti kita dop. Kita serahkan jangan pegang buntutnya Pak, kita serahkan kepada panja.

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian nomor 5 terakhir. Kalau ini sampai lima Pak. Komisi X DPR-RI dan Pemerintah menyetujui jawaban pemerintah atas pertanyaan dan pandangan anggota Komisi X DPR-RI pada

raker tanggal 15 Oktober 2018 bagi bahan yang tidak terpisahkan dari DIM RUU tentang Ekonomi Kreatif dan menjadi salah satu bahan rujukan dalam pembahasan panja. Ini jawabannya sudah kami terima dan ini kita sepakati menjadi bahan bagi anggota yang tidak terpisahkan kalau ada apa-apa kemudian merujuk pada ini. Begitu ya, setuju ya, ini terutama komisi X setuju. Ini sebagai bahan yang kalau pun belum dibaca, ini dipegang untuk kemudian sebagai dasar untuk pembahasan.

(RAPAT : SETUJU)

Dengan demikian selesai juga ini laporan singkat kesimpulan dari Rapat Kerja hari ini dan sebelum kami tutup, kami minta sepata dua pata kata atau jangan pata-pata juga boleh. Dari Pak Menteri Perdagangan silakan Pak Enggar.

MENTERI PERDAGANGAN RI (ENGGARTIASTO LUKITA):

Bapak dan Ibu Pimpinan Komisi X beserta seluruh anggota Komisi X yang terhormat.

Ijinkan kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ini sampai tengah malam masih bersidang untuk membahas mengenai RUU ini yang menunjukkan keseriusan kita bersama untuk menyelesaikan.

Bapak ketua, sesuai dengan pembicaraan hasil raker sebelumnya pada tanggal 15, maka pemerintah mengusulkan untuk menyelenggarakan FGD pada tanggal 30 Oktober sebelum reses. Jadi masih dalam masa sidang kami tidak akan mengganggu masa reses, karena tugas anggota dewan tentu harus menyerap dan mensosialisasikan ke daerah. Dan Insya Allah kami akan selenggarakan di Hotel Sultan kalau tidak ada keberatan dari Anggota Dewan yang terhormat.

Demikian hal-hal yang bisa kami sampaikan, Bapak ketua dan para anggota yang terhormat, kita menyepakati untuk melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya dan kami akan penuh untuk mengikuti jadwal yang disepakati nanti.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Walaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh

Terima kasih Pak menteri.

Kami berharap pada menteri Perdagangan RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini hadir Biro Hukum, kemudian Kementerian Pariwisata Ibu Kiki, kemudian Kementerian Koperasi UMKM Pak Abdul Kadir, kemudian Kementerian PAN dan RB Pak Astori dari Deputi, kemudian dari Kemenkumham Pak Yunan Helmi dan kemudian ini yang nanti akan mendampingi kami terus Badan Ekonomi Kreatif Pak Ricky dan Pak Restok. Ini ada tawaran sebelum saya tutup ada FGD nya tanggal 30 Bapak-Ibu. Jadi itu paginya penutupan, penutupan masa sidang. Oh 31 penutupan, kemudian 30 ini masih dalam masa sidang.

Setuju ya.

Terima kasih sekali dan kami mengucapkan terima kasih atas inisiatifnya juga dari pemerintah. Mudah-mudahan ini lebih membuka soalnya hal-hal yang mungkin nanti rapat-rapat atau di rapat panja ataupun rapat dengar pendapat atau raker, itu mungkin nanti kemungkinan alot, nanti di FGD dibuka saja, apa saja yang kira-kira agak sulit. Yang sulit-sulit dikerjakan dulu mungkin yang mudah belakangan juga boleh. Nanti kami berharap seperti harapan kami bahwa hal-hal yang berat itu kalau bisa diselesaikan lebih dulu terutama dari tim pemerintah, sehingga bertemu nanti tidak ada masalah.

Terima kasih kepada pemerintah dan seluruh Anggota Komisi X DPR-RI yang terhormat dan serta hadirin sekalian dengan sabar dan sudah Jam 8 lebih seperempat bukan jam 9.

Dengan mengucapkan alhamdulillahirobilalamin, maka Rapat Kerja mala mini kami nyatakan ditutup.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh

RAPAT DITUTUP PUKUL 20.15 WIB

Jakarta, 22 Oktober 2018
Ketua rapat,

TTD

**DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH
ANGGOTA:-112**